

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garafindo, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Badan Pertanahan Nasional, 2006, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bumi Bakti, Jakarta.
- Djohan, Djohermansyah, 2005, *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Haris Syamsudin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Harso, Budi, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001), cet. 1*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, cet.10*, Djambatan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanto, Andy, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis*, Laksbang Justisia, Surabaya
- Kartono, Kartini , 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Kencana, Jakarta
- Parlindungan, AP, 1988, *Pendaftaran tanah dan Konversi Hak Atas Tanah menurut UUPA*, Alumni.
- Perangin, Effendi, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

- _____, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwodharmo, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Limbong, Benhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Soejendro, J. Kartini, 2001, *Perjanjian Peralihan hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Tafsir Sosial Hukum Ketika Menangani Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5*, PT Raja Grafindo Persada), Jakarta.
- Soelarman, 1998, *Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997*, Jakarta
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Alam, Jakarta.
- Subarno, Hari, 2004, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunindhia, Y.W; Ninik Widiyanti, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria :Beberapa Pemikiran*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Tehupeiory, Aartje, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2012, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum, cetakan ke -4*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Makalah, Internet, dan Artikel

Harsono, Boedi, 1990, Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah , Jakarta: Makalah , *Seminar tentang Pendaftaran Tanah Di Bidang Hak Tanggungan dan PPAT*,1990,

Laporan Kinerja Badan Pertanahan Pakpak Bharat, 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi

<https://pakpakbharatkab.bps.go.id/statictable/2015/09/28/3/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-di-kabupaten-pakpak-bharat-tahun-2004-2014.html>”.

